

Digitalisasi Administrasi Publik untuk Efisiensi Pengiriman Slip Gaji di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Digitalization of Public Administration for the Efficiency of Payroll Slip Distribution at the Ministry of Women Empowerment and Child Protection of Indonesia

Laili Fitra Sani Lukman¹

¹ Politeknik STIA LAN Jakarta, Jakarta Pusat
Corresponding author : laililukman.scholar@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Transformasi digital dalam administrasi publik merupakan strategi penting dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan digital governance melalui otomatisasi distribusi slip gaji di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Sebelum digitalisasi, distribusi slip gaji dilakukan secara manual dengan cara screenshot slip dari file PDF kemudian dikirimkan satu per satu ke email pegawai. Proses tersebut memerlukan waktu lama, menambah beban administratif, dan berisiko menimbulkan kesalahan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus dan metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk membandingkan efisiensi waktu, beban kerja, dan transparansi antara sistem manual dan sistem digital. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem digitalisasi slip gaji yang memanfaatkan Microsoft Word, Excel, Outlook, dan Visual Basic for Applications (VBA) mampu memangkas waktu distribusi dari beberapa hari menjadi hitungan jam, mengurangi pekerjaan administratif repetitif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui akses langsung pegawai terhadap slip gaji mereka. **Kesimpulan:** Walaupun terdapat keterbatasan seperti ketergantungan pada aplikasi Microsoft Office dan variasi literasi digital pegawai, sistem ini terbukti efektif dan dapat direplikasi di instansi pemerintah lain sebagai praktik baik digitalisasi administrasi publik.

Kata Kunci : digital governance, administrasi publik, slip gaji, otomatisasi, efisiensi

Abstract

Background: Digital transformation in public administration is an essential strategy in bureaucratic reform to enhance efficiency, transparency, and accountability in line with the principles of good governance. This study aims to analyze the implementation of digital governance through the automation of payroll slip distribution at the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. Prior to digitalization, payroll slips were distributed manually by taking screenshots of PDF files and sending them individually to employees' emails. This process was time-consuming, increased administrative workload, and posed a risk of errors. **Method:** The study employed a qualitative descriptive approach with a case study strategy and the waterfall software development method. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed descriptively to compare time efficiency, workload, and transparency between manual and digital systems. **Result:** The results indicate that the payroll slip digitalization system, which integrates Microsoft Word, Excel,

*Outlook, and Visual Basic for Applications (VBA), successfully reduced distribution time from several days to just hours, minimized repetitive administrative tasks, and enhanced transparency and accountability by providing employees with direct access to their payroll slips. **Conclusion:** Although limitations remain, such as dependency on Microsoft Office applications and varying levels of digital literacy among employees, the system proved effective and can be replicated in other government institutions as a best practice of public administration digitalization.*

Keywords : digital governance, public administration, payroll slip, automation, efficiency

PENDAHULUAN

Administrasi publik di era digital dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi agar dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Digitalisasi administrasi publik merupakan strategi penting dalam reformasi birokrasi yang sejalan dengan prinsip good governance, yaitu efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan [1]. Digital governance sebagai paradigma baru menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan, mengintegrasikan data, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat [2].

Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik mampu mengurangi hambatan birokrasi tradisional yang selama ini identik dengan proses manual, lambat, dan rentan kesalahan. Penelitian di Kabupaten Jember membuktikan bahwa digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik [3]. Hasil penelitian di Kota Surakarta menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital mempercepat waktu layanan dan memperkuat integrasi data publik meskipun menghadapi tantangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur [4].

Kementerian PPPA sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki tugas penting dalam administrasi kepegawaian. Salah satu komponen administrasi tersebut adalah slip gaji pegawai. Slip gaji tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen transparansi yang memberikan informasi rinci mengenai hak dan kewajiban pegawai. Akan tetapi, distribusi slip gaji di Kementerian PPPA masih dilakukan secara manual. Slip gaji yang dihasilkan dalam format PDF dari aplikasi gaji dipisahkan secara manual dengan cara screenshot satu per satu, kemudian dikirimkan melalui email pegawai satu per satu. Prosedur ini memerlukan waktu lama, meningkatkan beban administratif pegawai, dan membuka potensi kesalahan distribusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan digital governance dan praktik manual yang masih berlangsung.

Penelitian terdahulu di berbagai instansi pemerintah memperkuat urgensi digitalisasi slip gaji. Studi di Bappeda Provinsi Papua Tengah menunjukkan bahwa penerapan slip gaji digital mempercepat distribusi, mengurangi penggunaan kertas, dan meningkatkan efektivitas kerja staf administrasi [5]. Penelitian di UPT Balai Latihan Kerja Mojokerto menemukan bahwa sistem slip gaji berbasis web mobile

mempermudah pegawai dalam mengakses informasi gaji meskipun masih menghadapi kendala teknis [6]. Penelitian di Kabupaten Mahakam Ulu menyimpulkan bahwa tata kelola digital dalam sistem penggajian meningkatkan akurasi, mempercepat distribusi gaji, dan mendukung transparansi keuangan [7]. Selain itu, penelitian di Kabupaten Labuhanbatu menemukan bahwa penerapan teknologi digital dalam administrasi publik mampu meningkatkan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan kualitas pelayanan [8].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan digital governance dalam administrasi publik melalui otomatisasi pengiriman slip gaji di Kementerian PPPA. Inovasi sederhana menggunakan Microsoft Office Mail Merge dan Visual Basic for Applications (VBA) dipilih karena dapat diimplementasikan tanpa biaya besar namun memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi administrasi dan transparansi kepegawaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan digital governance dalam meningkatkan efisiensi distribusi slip gaji, menilai kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan rekomendasi pengembangan agar dapat direplikasi di instansi pemerintah lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus pada Kementerian PPPA. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan digital governance melalui digitalisasi proses administrasi kepegawaian khususnya pada distribusi slip gaji. Menurut Creswell [9], studi kasus kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena organisasi secara komprehensif melalui berbagai sumber data, sehingga sesuai dengan konteks penelitian ini.

Pengembangan sistem digitalisasi slip gaji dilakukan dengan menggunakan metode waterfall yang merupakan salah satu model klasik dalam rekayasa perangkat lunak. Metode waterfall dipilih karena memiliki tahapan sistematis mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan [10]. Tahapan analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan distribusi slip gaji manual di Kementerian PPPA melalui wawancara dengan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) serta studi dokumen internal. Dari tahap ini diperoleh informasi mengenai lamanya waktu distribusi, tingginya beban kerja administratif, dan potensi kesalahan dalam pengiriman slip gaji.

Tahap desain dilakukan dengan merancang alur distribusi slip gaji berbasis digital menggunakan perangkat Microsoft Office, yaitu integrasi antara Microsoft Word, Excel, dan Outlook. Proses desain meliputi perancangan format slip gaji yang sesuai dengan standar Kementerian PPPA serta penyusunan database gaji pegawai dalam Excel. Selanjutnya pada tahap implementasi, dilakukan pemrograman otomatisasi menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) yang diintegrasikan dengan fitur

Mail Merge pada Microsoft Word untuk menghasilkan slip gaji individual secara otomatis dan mengirimkannya langsung ke alamat email pegawai melalui Outlook.

Tahap pengujian dilakukan dengan menggunakan email *dummy* untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Proses pengujian mencakup validasi format slip gaji, keakuratan data, dan kecepatan distribusi email. Setelah sistem diuji dan berjalan baik, tahap pemeliharaan dilakukan dengan memantau penggunaan sistem oleh PPABP serta mengevaluasi kelemahan yang muncul. Salah satu keterbatasan yang ditemukan adalah ketidakmampuan sistem untuk mengakomodasi pengiriman slip kekurangan gaji karena data yang dihasilkan aplikasi pembayaran gaji belum sepenuhnya lengkap.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petugas PPABP untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka sebelum dan sesudah penerapan sistem digital. Observasi dilakukan dengan mengamati proses distribusi slip gaji secara manual dan membandingkannya dengan sistem otomatis. Dokumentasi meliputi pengumpulan arsip slip gaji, format dokumen, serta catatan waktu distribusi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan efisiensi waktu, beban kerja, dan tingkat kesalahan distribusi antara sistem manual dan sistem digital. Selain itu, data dari wawancara dianalisis untuk memahami persepsi pegawai terhadap manfaat sistem baru dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada kerangka digital governance yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital untuk mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan secara komprehensif efektivitas penerapan digital governance dalam distribusi slip gaji di Kementerian PPPA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan Sistem

Distribusi slip gaji di Kementerian PPPA sebelum penerapan digitalisasi masih dilakukan secara manual oleh PPABP. Slip gaji yang dihasilkan dalam format PDF dari aplikasi gaji dipisahkan dengan cara *screenshot* satu per satu, kemudian dikirimkan ke email pegawai secara individual. Proses ini bersifat repetitif, membutuhkan ketelitian tinggi, dan memakan waktu berhari-hari sehingga menambah beban administratif. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Atika [3] yang menyatakan bahwa praktik manual dalam administrasi publik memperlambat pelayanan dan menimbulkan inefisiensi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem distribusi slip gaji yang ideal harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, sistem perlu sederhana dan dapat

dioperasikan oleh staf administrasi meskipun tidak memiliki latar belakang teknologi tinggi. Kedua, sistem sebaiknya kompatibel dengan perangkat yang sudah tersedia di lingkungan kerja. Ketiga, sistem perlu memiliki kemampuan menjaga keamanan data pegawai. Keempat, sistem harus mampu mempercepat waktu distribusi tanpa mengurangi ketepatan informasi. Prinsip ini sesuai dengan konsep digital governance yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Implementasi Sistem Digitalisasi

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sistem digitalisasi slip gaji dirancang dengan memanfaatkan integrasi Microsoft Word, Excel, dan Outlook serta pemrograman Visual Basic for Applications (VBA). Aplikasi gaji yang digunakan di Kementerian PPPA menghasilkan data gaji pegawai dalam bentuk file Excel. File ini dijadikan basis data utama dalam proses pembuatan slip gaji. Fitur Mail Merge pada Microsoft Word digunakan untuk menghubungkan data Excel dengan template slip gaji sehingga dapat menghasilkan slip gaji individual.

Untuk mempercepat proses distribusi, VBA diprogram agar slip gaji hasil Mail Merge dapat langsung disimpan dalam format PDF kemudian dikirimkan secara otomatis ke alamat email resmi masing-masing pegawai melalui Outlook. Dengan sistem ini, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti melakukan screenshot slip gaji satu per satu dan mengirimkannya secara terpisah, dapat digantikan oleh proses otomatisasi.

Sistem ini bersifat sederhana dan berbasis desktop sehingga tidak memerlukan infrastruktur server atau jaringan tambahan. Dengan demikian, sistem dapat langsung digunakan dengan memanfaatkan perangkat dan aplikasi Microsoft Office yang sudah tersedia di Kementerian PPPA.

Uji coba sistem dilakukan menggunakan email *dummy* untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan slip gaji sesuai format resmi yang digunakan di Kementerian PPPA dan mengirimkannya secara otomatis ke email pegawai. Proses distribusi yang sebelumnya membutuhkan waktu sehari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan VBA dan fitur Mail Merge mampu menghadirkan solusi digital sederhana namun efektif dalam meningkatkan efisiensi distribusi slip gaji.

Dampak Digitalisasi

Penerapan digitalisasi slip gaji di Kementerian PPPA menghasilkan beberapa dampak penting.

1. Efisiensi waktu

Distribusi slip gaji yang sebelumnya membutuhkan tiga hingga lima hari karena harus dilakukan screenshot dan pengiriman manual kini dapat dipangkas menjadi hitungan jam. Percepatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi sederhana dapat menghadirkan perubahan signifikan dalam kecepatan proses administrasi. Hal ini konsisten dengan prinsip digital governance yang menekankan penggunaan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas kerja organisasi.

2. Pengurangan beban administratif

Sistem otomatisasi meringankan beban PPABP karena menghilangkan pekerjaan repetitif seperti screenshot slip gaji dan pengiriman email satu per satu. Dengan adanya otomatisasi, pegawai dapat mengalihkan fokus pada pekerjaan lain yang bersifat analitis maupun strategis. Hal ini mendukung penelitian Hipui & Fitriati [7] yang menyatakan bahwa tata kelola digital dalam penggajian meningkatkan produktivitas pegawai karena mengurangi pekerjaan administratif berulang.

3. Transparansi dan akuntabilitas

Slip gaji yang dikirim langsung ke email pegawai meningkatkan transparansi karena setiap pegawai memperoleh informasi secara cepat dan akurat mengenai hak gaji mereka. Transparansi ini memperkuat akuntabilitas organisasi karena meminimalisasi potensi ketidakjelasan informasi. Dampak ini sesuai dengan konsep digital governance yang menekankan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah [11].

Evaluasi dan Tantangan

Sistem digitalisasi ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sistem belum mampu mengakomodasi pengiriman slip kekurangan gaji karena data dari aplikasi pembayaran gaji induk tidak sepenuhnya lengkap. Kedua, sistem sangat bergantung pada aplikasi Microsoft Office sehingga jika terjadi pembaruan atau perubahan kebijakan lisensi perangkat lunak, sistem dapat terganggu. Ketiga, literasi digital pegawai menjadi faktor penting dalam keberlanjutan penggunaan sistem.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sundari & Sartika [1] yang menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital, keamanan data, dan keterbatasan integrasi sistem. Oleh sebab itu, keberhasilan jangka panjang digitalisasi slip gaji di Kementerian PPPA

memerlukan dukungan berupa peningkatan literasi digital pegawai, integrasi dengan sistem berbasis web atau cloud, serta kebijakan keamanan data yang lebih kuat.

Diskusi Teoretis

Penerapan digitalisasi slip gaji di Kementerian PPPA menunjukkan bagaimana konsep digital governance dapat diterapkan pada level mikro administrasi publik. Digital governance menekankan integrasi teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, menciptakan efisiensi, serta memperkuat transparansi. Dalam penelitian ini, otomatisasi distribusi slip gaji tidak hanya mempercepat layanan internal tetapi juga memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa digitalisasi administrasi publik tidak sekadar adopsi teknologi, melainkan transformasi tata kelola yang membawa dampak pada perubahan budaya organisasi. Dengan adanya digitalisasi, pegawai mulai terbiasa bekerja dengan pola berbasis teknologi yang pada akhirnya meningkatkan adaptabilitas organisasi terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan era digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik melalui otomatisasi distribusi slip gaji di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan akuntabilitas birokrasi. Sistem yang dikembangkan memanfaatkan integrasi Microsoft Word, Excel, Outlook, dan Visual Basic for Applications (VBA) untuk mengolah data gaji pegawai dan mengirimkan slip gaji secara otomatis dalam format PDF ke alamat email resmi pegawai.

Hasil implementasi membuktikan bahwa distribusi slip gaji yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari dengan prosedur manual dapat dipangkas menjadi hitungan jam. Otomatisasi ini juga meringankan beban administratif pegawai karena pekerjaan repetitif digantikan oleh sistem, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui akses langsung pegawai terhadap informasi gaji mereka.

Meskipun demikian, sistem masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait ketergantungan pada aplikasi Microsoft Office, belum optimalnya data untuk slip kekurangan gaji, serta variasi literasi digital di kalangan pegawai. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk integrasi dengan sistem berbasis web atau cloud dan peningkatan kapasitas literasi digital pegawai. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa digital governance dapat diimplementasikan melalui inovasi sederhana yang memberi dampak signifikan bagi efisiensi administrasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di instansi pemerintah lain dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Sundari dan I. Sartika, "Advancing Public Service Quality through Indonesia's Electronic-Based Government System," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, vol. 4, no. 8, hlm. 902-911, 2025, doi: 10.58471/esaprom.v4i08.
- [2] A. Addarisalam, A. Supriana, B. S. Budi, dan R. Ardyansyah, "Tantangan dan Peluang Implementasi Smart Governance di Indonesia: Tinjauan Komparatif Literatur untuk Konteks Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, vol. 3, no. 3, hlm. 114-125, 2025, doi: 10.61132/neptunus.v3i3.946.
- [3] T. U. Atika, "Optimalisasi Tata Kelola Melalui Digitalisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi di Jember," *Indonesian Journal of Public Administration Review*, vol. 2, no. 3, hlm. 10, Jun 2025, doi: 10.47134/par.v2i3.4214.
- [4] F. A. Al-Muttaqin dan R. A. Nugroho, "Effectiveness of Digital-Based Public Service Innovation: Case Study of Population Services in Indonesia's Local Government," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, vol. 11, no. 1, hlm. 1-16, Mar 2025, doi: 10.31947/jakpp.v11i1.11802.
- [5] K. Yulawan dan A. T. Indriani, "Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Optimasi Pembuatan Slip Gaji Digital: solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di kantor BAPPEDA Provinsi Papua Tengah," no. 9, hlm. 29-39, doi: 10.35326/pkm.v9i1.5926.
- [6] R. N. Adila dan A. Prihanto, "Sistem Pelaporan Slip Gaji Pegawai Berbasis Web Mobile Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus UPT Balai Latihan Kerja Mojokerto)," *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, vol. 6, no. 03, hlm. 730-739, Jan 2025, doi: 10.26740/jinacs.v6n03.p730-739.
- [7] M. V. Hipui dan R. Fitriati, "Tata Kelola Digital Sistem Penggajian Berbasis Kinerja pada Pegawai Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 7, no. 6, hlm. 8056-8075, 2024.
- [8] A. S. Daulay, A. Patwal, B. Wahyudi, P. M. Ritonga, S. E. S. Nasution, dan A. Harahap, "Efficiency of Administrative Processes Through the Implementation of Digital Technology in Quality Public Services in Labuhanbatu Regency," *International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)*, vol. 5, no. 2, hlm. 681-689, 2025, [Daring]. Tersedia pada: <http://lppipublishing.com/index.php/ijessm>
- [9] J. W. Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, 3 ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2013.
- [10] R. S. Pressman, *Software engineering: A practitioner's approach*, 7 ed. Boston: McGraw-Hill Education, 2010. [Daring]. Tersedia pada: www.mhhe.com/pressman.
- [11] N. Sibuea, "Digital Innovation as the Key to Efficiency and Accountability of Public Administration in Medan City, Indonesia," *Golden Ratio of Data in Summary*, vol. 5, no. 1, hlm. 24-31, Jan 2025, doi: 10.52970/grdis.v5i1.821.